

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



MATA KULIAH	:	Pengantar Ilmu Pemerintahan
KODE MK	:	3KKFS100
SEMESTER	:	1

Tim Penyusun:

Marten Nusi, S.I.P., M.A.P

(Program Studi Ilmu Pemerintahan — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo)

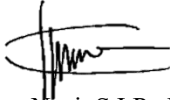
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

1. Analisis Pembelajaran

Diagram berikut menggambarkan keterkaitan konstruktif (constructive alignment) dari kemampuan awal, melalui Sub-CPMK secara berjenjang dan asesmen (UTS/UAS), hingga pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini.



2. Rencana Pembelajaran Semester

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				Kode Dokumen RPS-3KKFS100	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pengantar Ilmu Pemerintahan		3KKFS100	MKWP	T=3	P=0	1	31 Mei 2023
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI		
		 Marten Nusi, S.I.P., M.A.P NIDN. 0911038502	 Damawaty Abd. Razak, S.I.P., M.A.P NIDN. 0924076701		 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-02	Menguasai konsep teoretis ilmu pemerintahan, ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu sebagai landasan menjelaskan dan menganalisis gejala pemerintahan serta politik.					
	CPL-03	Menguasai sistem pemerintahan Indonesia, hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.					
	CPL-06	Mampu menganalisis dinamika politik, kekuasaan, demokrasi, pemilihan, dan partisipasi masyarakat pada aras lokal, nasional, maupun global.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu pemerintahan—mencakup definisi, objek kajian, paradigma, dan relasinya dengan ilmu politik, sosiologi, serta filsafat ilmu—sebagai kerangka epistemologis untuk memahami gejala pemerintahan.					
	CPMK2	Mahasiswa mampu menguraikan struktur dan mekanisme sistem pemerintahan Indonesia—meliputi kelembagaan negara, hukum tata pemerintahan, serta relasi hierarkis pemerintah pusat, daerah, dan desa—dengan mengacu pada kerangka konstitusional dan regulasi yang berlaku.					
	CPMK3	Mahasiswa mampu menganalisis dinamika kekuasaan, demokrasi, dan partisipasi masyarakat—termasuk pola pemilihan serta aktor politik—pada aras lokal (kawasan timur Indonesia), nasional, dan global dengan menggunakan pendekatan teoretis ilmu pemerintahan dan ilmu politik.					

	CPMK4	Mahasiswa mampu mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa—mencakup desentralisasi, otonomi daerah, dan tata kelola pemerintahan lokal—melalui studi kasus kontekstual di Kawasan Timur Indonesia guna menghasilkan penilaian kritis yang didukung argumen berbasis bukti.																																																					
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																							
Sub-CPMK1	Menjelaskan definisi ilmu pemerintahan dari minimal 4 perspektif tokoh dan membedakan objek material serta objek formal ilmu pemerintahan secara tertulis.																																																						
Sub-CPMK2	Mengklasifikasikan paradigma-paradigma utama ilmu pemerintahan (normatif, empiris, dan kritis) serta menilai relevansi masing-masing paradigma dalam konteks gejala pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia.																																																						
Sub-CPMK3	Menganalisis relasi ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu dengan mengidentifikasi titik temu, perbedaan, dan kontribusi lintas disiplin tersebut melalui studi literatur komparatif.																																																						
Sub-CPMK4	Menyusun kerangka epistemologis ilmu pemerintahan secara terpadu—mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi—sebagai landasan untuk menganalisis satu gejala pemerintahan aktual, sebagai persiapan UTS.																																																						
Sub-CPMK5	Menjelaskan konsep negara, pemerintah, dan pemerintahan serta membandingkan teori-teori legitimasi kekuasaan dari perspektif klasik dan kontemporer.																																																						
Sub-CPMK6	Menganalisis fungsi-fungsi pemerintahan (pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan) melalui studi kasus nyata pada unit pemerintahan daerah di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia menggunakan pendekatan Case-Based Learning.																																																						
Sub-CPMK7	Mengevaluasi dinamika relasi antara negara dan masyarakat sipil dalam konteks tata kelola pemerintahan demokratis dengan menggunakan minimal 2 perspektif teoritik yang berbeda.																																																						
Sub-CPMK8	Merancang dan mempresentasikan sintesis kritis atas perkembangan ilmu pemerintahan—dari pendekatan klasik menuju kontemporer—serta implikasinya bagi praktik pemerintahan adaptif dan berintegritas di Indonesia, sebagai capstone menjelang UAS.																																																						
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK																																																							
	<table><tr><td></td><td>CPMK1</td><td>CPMK2</td><td>CPMK3</td><td>CPMK4</td></tr><tr><td>Sub-CPMK1</td><td>√</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK2</td><td>√</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK3</td><td>—</td><td>√</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK4</td><td>—</td><td>√</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK5</td><td>—</td><td>—</td><td>√</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK6</td><td>—</td><td>—</td><td>√</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK7</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>√</td></tr><tr><td>Sub-CPMK8</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>√</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>						CPMK1	CPMK2	CPMK3	CPMK4	Sub-CPMK1	√	—	—	—	Sub-CPMK2	√	—	—	—	Sub-CPMK3	—	√	—	—	Sub-CPMK4	—	√	—	—	Sub-CPMK5	—	—	√	—	Sub-CPMK6	—	—	√	—	Sub-CPMK7	—	—	—	√	Sub-CPMK8	—	—	—	√	Jumlah	2	2	2	2
	CPMK1	CPMK2	CPMK3	CPMK4																																																			
Sub-CPMK1	√	—	—	—																																																			
Sub-CPMK2	√	—	—	—																																																			
Sub-CPMK3	—	√	—	—																																																			
Sub-CPMK4	—	√	—	—																																																			
Sub-CPMK5	—	—	√	—																																																			
Sub-CPMK6	—	—	√	—																																																			
Sub-CPMK7	—	—	—	√																																																			
Sub-CPMK8	—	—	—	√																																																			
Jumlah	2	2	2	2																																																			

	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK					
		CPL-02 (%)	CPL-03 (%)	CPL-06 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu
	Sub-CPMK1	15			15	2
	Sub-CPMK2	15			15	2
	Sub-CPMK3		14		14	2
	Sub-CPMK4		7		7	1
	Sub-CPMK5	7		7	14	2
	Sub-CPMK6	7		7	14	2
	Sub-CPMK7		7	7	14	2
	Sub-CPMK8		4	3	7	1
		44	32	24	100	14
Deskripsi Singkat MK	Pengantar Ilmu Pemerintahan (3 SKS) merupakan mata kuliah fondasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang membekali mahasiswa dengan kerangka epistemologis untuk menjelaskan dan menganalisis gejala pemerintahan secara sistematis, berlandaskan konsep teoretis ilmu pemerintahan, ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu (BK-01 dan BK-02). Mata kuliah ini memposisikan diri sebagai pijakan konseptual bagi seluruh mata kuliah keahlian berikutnya, dengan cakupan yang bergerak secara progresif dari penguasaan definisi, objek kajian, dan paradigma ilmu pemerintahan, menuju penguraian struktur kelembagaan negara, hukum tata pemerintahan, serta relasi hierarkis pemerintah pusat, daerah, dan desa sesuai kerangka konstitusional yang berlaku. Mahasiswa selanjutnya dilatih menganalisis dinamika kekuasaan, demokrasi, pemilihan, dan partisipasi masyarakat pada aras lokal—dengan perhatian khusus pada konteks Kawasan Timur Indonesia termasuk wilayah sekitar Universitas Islam Al-Ghazali (UNISAN)—nasional, maupun global, serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa melalui studi kasus kontekstual yang menghasilkan penilaian kritis berbasis bukti. Pembelajaran diselenggarakan dengan pendekatan Student-Centered Learning melalui Case-Based Learning dan Project-Based Learning sebagaimana diamanatkan SN-Dikti Pasal 14 dan KPT 2024, sehingga mahasiswa tidak sekadar menguasai teori secara pasif, melainkan mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan sikap integritas ilmiah (Integrity) serta kepekaan terhadap realitas pemerintahan lokal (Service dan Nationalism) yang menjadi penciri nilai ICHSA-N dalam kehidupan akademik dan profesional.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Definisi dan objek kajian ilmu pemerintahan; 2. Relasi ilmu pemerintahan dengan ilmu politik; 3. Filsafat ilmu dan paradigma pemerintahan; 4. Sosiologi sebagai perspektif analisis pemerintahan; 5. Teori kekuasaan dan legitimasi negara; 6. Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer; 7. Kelembagaan negara dan hukum tata pemerintahan;					

	8. Relasi pemerintah pusat, daerah, dan desa; 9. Desentralisasi dan otonomi daerah; 10. Dinamika demokrasi dan kepemiluan lokal-nasional; 11. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan; 12. Tata kelola pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia.						
Pustaka	Utama :						
	(1) Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama; (2) Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2016). Comparative Government and Politics: An Introduction. 10th Edition. Palgrave Macmillan; (3) Heywood, A. (2013). Politics. 4th Edition. Palgrave Macmillan; (4) Rodee, C. C., Anderson, T. J., Christol, C. Q., & Greene, T. H. (1983). Introduction to Political Science. 4th Edition. McGraw-Hill; (5) Syafiie, I. K. (2011). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Edisi Revisi. Refika Aditama.						
	Pendukung :						
	(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (4) Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; (5) Kaho, Josef Riwu. 2012. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.						
Dosen Pengampu	Dr. Arman, S.Sos., M.Si.						
Modalitas dan Matakuliah prasyarat	Modalitas: - Mata kuliah prasyarat: -						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Sub-CPMK1: Menjelaskan definisi ilmu pemerintahan dari minimal 4 perspektif tokoh dan membedakan objek material serta objek formal ilmu pemerintahan secara tertulis.	Mahasiswa mampu: Menyebutkan definisi ilmu pemerintahan menurut minimal 4 tokoh (antara lain Syafiie, Budiardjo, Hague, dan Heywood)	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu pengantar ini; dosen menggali	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka perkuliahan dengan kontrak belajar, memaparkan peta topik 16 minggu, lalu memandu diskusi kelas berskala penuh tentang definisi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rekaman video pengantar (10-15 menit) berisi orientasi mata kuliah, kontrak perkuliahan, dan peta konsep keseluruhan semester ke SPOT	Bahan Kajian: Definisi ilmu pemerintahan dari perspektif Syafiie, Budiardjo, Hague, dan Heywood;	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		secara tepat dan bersumber • Membedakan objek material dan objek formal ilmu pemerintahan dengan mengidentifikasi setidaknya dua perbedaan mendasar di antara keduanya • Menjelaskan posisi ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu mandiri yang bersumber dari tradisi keilmuan sosial-politik • Menunjukkan sikap jujur akademik dalam merujuk pendapat tokoh tanpa plagiasi (Integrity)	pengetahuan awal melalui pertanyaan lisan terstruktur yang mengukur kemampuan mahasiswa mengidentifikasi minimal dua definisi ilmu pemerintahan sebelum perkuliahan dimulai Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan bertanya dan merespons pertanyaan dosen secara substansif; mahasiswa mampu menyampaikan pendapat awal tentang apa yang dipelajari ilmu pemerintahan dengan kalimat sendiri yang	ilmu pemerintahan dari 4 perspektif tokoh; dosen menggunakan tayangan perbandingan definisi untuk memancing perbedaan sudut pandang (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak, mencatat perbedaan definisi tokoh, dan bergiliran menyampaikan hasil bacaan singkat yang sudah disiapkan dari sesi daring; kelas dibagi menjadi empat kelompok kecil untuk mendiskusikan satu tokoh per kelompok lalu mempresentasikan dua poin kunci MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok kecil menganalisis kutipan definitif empat tokoh dan mengaitkannya dengan satu gejala pemerintahan	UNISAN; dosen membuka forum diskusi awal dengan pertanyaan pemantik: 'Apa perbedaan pemerintah dan pemerintahan?' (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh silabus dan kontrak perkuliahan dari SPOT UNISAN, menonton video pengantar dosen, dan memposting satu paragraf jawaban atas pertanyaan pemantik di forum diskusi sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa membaca satu kasus singkat (berita tata kelola pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia yang diunggah dosen) dan mengidentifikasi secara	• Objek material ilmu pemerintahan: negara, kekuasaan, dan hubungan antarwarga dengan pemerintah; • Objek formal ilmu pemerintahan: cara penyelenggaraan kekuasaan secara sah dan teratur; • Posisi ilmu pemerintahan di antara rumpun ilmu sosial; Pustaka: Syafiie (2011); Budiardjo (2008); Heywood (2013); Hague, Harrop, & McCormick (2016).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			bukan hafalan Tugas: Tidak ada tugas formal pada minggu ini; mahasiswa diminta membaca dua referensi utama (Syafiie 2011 Bab 1 dan Budiardjo 2008 Bab 1) sebagai persiapan diskusi minggu berikutnya	nyata di Kawasan Timur Indonesia yang diberikan dosen sebagai kasus pembuka Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa membaca Bab 1 Syafiie (2011) dan Bab 1 Budiardjo (2008) sebagai persiapan tertulis untuk pertemuan minggu ke-2; tidak ada pengumpulan formal minggu ini, namun mahasiswa diwajibkan membuat catatan bacaan pribadi yang akan digunakan sebagai dasar kuis dan diskusi pada minggu ke-2 Deliverable: Tidak ada pengumpulan tugas formal minggu ini; catatan bacaan pribadi dipersiapkan untuk digunakan pada sesi minggu ke-2	mandiri siapa pelaku pemerintahan, apa yang diatur, dan mengapa itu termasuk kajian ilmu pemerintahan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		
			Bentuk Penilaian	BP — Mekanisme kuliah:	BP — Mekanisme kuliah:	Bahan Kajian:	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tes/Unjuk Kerja: Kuis tertulis individu (bobot 15%): mahasiswa menjawab 3-5 pertanyaan esai pendek yang menguji kemampuan menjelaskan definisi ilmu pemerintahan dari 4 tokoh dan membedakan objek material serta formal; kriteria penilaian meliputi ketepatan definisi, kejelasan pembeda objek, penggunaan kutipan sumber, dan koherensi argumen; skor maksimal tiap soal berdasarkan rubrik 4 level (kurang-cukup-	Dosen memulai dengan membahas temuan tabel perbandingan yang dikumpulkan mahasiswa secara agregat (tanpa menyebut nama), lalu melaksanakan kuis tertulis individu; setelah kuis, dosen memandu diskusi pleno tentang relasi ilmu pemerintahan dan ilmu politik menggunakan kasus tata kelola daerah Kawasan Timur Indonesia sebagai konteks (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan kuis secara individual, kemudian berpartisipasi dalam diskusi pleno dengan merujuk pada definisi tokoh yang telah dipelajari; kelompok kecil dari minggu ke-1 mempresentasikan satu argumen tentang mengapa objek formal ilmu pemerintahan berbeda dari	Dosen mengunggah kisi-kisi kuis dan panduan pengisian tabel perbandingan ke SPOT UNISAN sebelum sesi tatap muka; dosen membuka sesi tanya-jawab asinkron di forum SPOT untuk mengklarifikasi kerancuan konsep dari catatan bacaan minggu ke-1 (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa melengkapi tabel perbandingan berdasarkan bacaan mandiri, mengunggahnya ke SPOT UNISAN sebelum kelas dimulai, dan membaca balikan singkat dari dosen melalui fitur komentar tugas di LMS MP — Metode Pembelajaran:	• Definisi ilmu pemerintahan dari 4 tokoh: Syafiie, Budiardjo, Hague, dan Heywood; • Pembedaan objek material (negara, kekuasaan) dan objek formal (cara penyelenggaraan kekuasaan yang sah) ilmu pemerintahan; • Relasi dan perbedaan antara ilmu pemerintahan dan ilmu politik sebagai dua disiplin yang bersinggungan; • Penerapan perspektif ilmu pemerintahan pada kasus tata kelola daerah; Pustaka: Syafiie (2011); Budiardjo (2008); Heywood (2013); Hague, Harrop, & McCormick (2016); Rodee, Anderson,	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			baik-sangat baik) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok studi kasus: mahasiswa mampu menyampaikan argumen yang mengacu pada minimal satu tokoh yang dikutip dengan benar; sikap menghargai pendapat kelompok lain dinilai sebagai komponen etika akademik Tugas: Tabel perbandingan individu (1 halaman A4): memuat kolom definisi tokoh	fokus ilmu politik MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelas menganalisis bersama satu kasus nyata konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di Kawasan Timur Indonesia, lalu mengidentifikasi apakah kasus tersebut lebih tepat dianalisis dari perspektif ilmu pemerintahan atau ilmu politik dan mengapa Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menyusun tabel perbandingan individual yang memuat: (1) definisi ilmu pemerintahan dari minimal 4 tokoh dengan kutipan sumber eksplisit, (2) pembeda objek material dan objek formal ilmu pemerintahan, dan (3) satu	Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis satu dokumen kebijakan pemerintah daerah (diakses dari JDIH) dan menentukan secara mandiri apakah substansinya lebih masuk dalam domain ilmu pemerintahan atau ilmu politik, disertai alasan berbasis definisi tokoh Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Christol, & Greene (1983).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(minimal 4 tokoh), objek material, objek formal, dan hubungannya dengan ilmu politik; dikumpulkan di SPOT UNISAN sebelum kuis dimulai	kolom yang menjelaskan posisi ilmu pemerintahan dalam relasinya dengan ilmu politik berdasarkan argumen salah satu tokoh; tabel disertai paragraf penutup satu alinea yang menjelaskan relevansi perbedaan objek tersebut dalam memahami gejala pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia Deliverable: Tabel perbandingan individual (1 halaman A4, format PDF atau Word) diunggah ke SPOT UNISAN sebelum sesi kelas minggu ke-2 dimulai			
3,4	Sub-CPMK2: Mengklasifikasikan paradigma-paradigma utama ilmu pemerintahan (normatif, empiris, dan kritis) serta menilai relevansi masing-masing paradigma dalam konteks gejala pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia.	Mahasiswa mampu: • Mengklasifikasikan tiga paradigma utama ilmu pemerintahan (normatif, empiris, dan kritis) beserta asumsi dasarnya masing-masing dalam bentuk klasifikasi tertulis yang	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini; pemahaman awal dikonfirmasi melalui pertanyaan lisan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memaparkan kerangka filsafat ilmu (ontologi-epistemologi-aksiologi) dan posisi tiga paradigma ilmu pemerintahan di dalamnya; setelah paparan, dosen membagi kelas ke dalam kelompok kecil (3-4	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan bacaan terpilih tentang filsafat ilmu dan paradigma ilmu sosial ke SPOT UNISAN disertai panduan membaca dua halaman yang mengarahkan mahasiswa pada tiga pertanyaan	Bahan Kajian: • Landasan filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu pemerintahan; • Paradigma normatif: asumsi tentang nilai ideal pemerintahan yang baik;	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		logis • Membandingkan cara pandang paradigma normatif, empiris, dan kritis dalam menelaah gejala pemerintahan menggunakan minimal satu contoh kasus konkret • Mengidentifikasi landasan filsafat ilmu (ontologi, epistemologi, aksiologi) yang menopang masing-masing paradigma berdasarkan sumber yang dikutip • Mengembangkan perspektif analitis orisinal dalam mengaitkan salah satu paradigma dengan gejala pemerintahan lokal Kawasan Timur Indonesia (Creativity)	terstruktur dan peta konsep kelompok yang dinilai berdasarkan kelengkapan (memuat ketiga paradigma), ketepatan klasifikasi asumsi, dan keterkaitan logis antarkonsep Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok studi kasus: mahasiswa mampu menghubungkan paradigma yang dibahas dengan contoh kasus nyata secara argumentatif, bukan sekadar mendefinisikan ulang; sikap mendengarkan dan merespons	orang) yang masing-masing mendapat satu paradigma untuk dipetakan dan dibahas menggunakan kasus yang sama (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun peta konsep paradigma yang ditugaskan, lalu mempresentasikannya di depan kelas; kelas memberikan tanggapan singkat tentang kekuatan dan keterbatasan paradigma yang dipresentasikan dalam menganalisis kasus pemerintahan lokal MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: setiap kelompok menganalisis kasus yang sama dari sudut pandang paradigma yang berbeda,	kunci: apa yang dianggap nyata, bagaimana cara mengetahui, dan untuk apa pengetahuan digunakan dalam konteks masing-masing paradigma (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca bahan yang diunggah dosen dan menjawab tiga pertanyaan panduan secara singkat di forum diskusi SPOT UNISAN sebelum sesi tatap muka; jawaban berfungsi sebagai aktivasi pengetahuan awal yang akan dikembangkan saat diskusi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri membaca ringkasan satu kasus kebijakan pemerintah	• Paradigma empiris: asumsi tentang fakta dan regularitas perilaku pemerintahan yang dapat diukur; • Paradigma kritis: asumsi tentang kekuasaan, ketimpangan, dan emansipasi dalam pemerintahan; • Relevansi pilihan paradigma terhadap analisis gejala pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Syafiie (2011); Heywood (2013); Hague, Harrop, & McCormick (2016).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			argumen kelompok lain secara konstruktif dinilai Tugas: Peta konsep kelompok (3-4 orang) yang menggambarkan tiga paradigma ilmu pemerintahan beserta asumsi, metode, dan satu contoh penerapan per paradigma pada konteks pemerintahan; peta konsep dikerjakan di kelas dan difoto/diunggah ke SPOT UNISAN pada hari yang sama (1 halaman A3 atau gambar digital)	sehingga kelas dapat membandingkan bagaimana paradigma normatif, empiris, dan kritis menghasilkan pertanyaan riset dan rekomendasi kebijakan yang berbeda Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (3-4 orang) menyusun peta konsep yang memuat: (1) tiga paradigma ilmu pemerintahan beserta asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis masing-masing, (2) metode analisis yang lazim digunakan tiap paradigma, dan (3) satu contoh penerapan per paradigma pada gejala pemerintahan nyata; peta konsep dikerjakan selama sesi luring dan dilengkapi satu paragraf refleksi yang menjelaskan paradigma mana yang paling relevan	daerah di Kawasan Timur Indonesia yang disiapkan dosen, kemudian mengidentifikasi paradigma apa yang paling tepat digunakan untuk menganalisisnya dan menuliskan alasan singkat di forum daring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				untuk menganalisis gejala pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia disertai alasan berbasis bacaan Deliverable: Foto peta konsep atau file gambar digital (format JPG/PNG) diunggah ke SPOT UNISAN pada hari yang sama setelah sesi kelas berakhir; paragraf refleksi dilampirkan sebagai teks di kolom komentar unggahan			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Esai analitis individu (bobot 15%): mahasiswa menulis esai 500-700 kata yang mengklasifikasikan tiga paradigma utama ilmu pemerintahan dan menilai relevansi salah satu paradigma untuk	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka kelas dengan meminta 3-4 mahasiswa mempresentasikan argumen esai mereka secara lisan (3 menit per mahasiswa) sebagai bahan diskusi pleno; dosen kemudian memandu refleksi kelas tentang tantangan menerapkan teori paradigma pada konteks empiris Kawasan Timur Indonesia dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rubrik penilaian esai analitis ke SPOT UNISAN dan membuka sesi konsultasi daring asinkron di forum LMS untuk menjawab pertanyaan mahasiswa tentang pilihan kasus dan argumen paradigma; dosen memberikan balikan umum atas peta konsep kelompok dari minggu ke-3 melalui	Bahan Kajian: • Klasifikasi paradigma normatif, empiris, dan kritis beserta asumsi, metode, dan implikasi kebijakan masing-masing; • Penerapan paradigma pemerintahan pada analisis kasus gejala pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			menganalisis satu gejala pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia yang dipilih sendiri; kriteria penilaian: ketepatan klasifikasi paradigma (30%), kedalaman penilaian relevansi berbasis bukti teks (35%), koherensi argumen dan struktur esai (20%), dan kejujuran pengutipan sumber (15%) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi presentasi studi kasus kelompok: mahasiswa mampu memberikan	menutup topik Sub-CPMK2 dengan sintesis (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak presentasi rekan dan memberikan satu pertanyaan atau tanggapan tertulis singkat; sesi diakhiri dengan dosen memberikan umpan balik menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan umum dalam menerapkan paradigma pada kasus lokal MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelas membahas bersama dua kasus kontras pemerintahan lokal di Kawasan Timur Indonesia (satu yang berhasil dan satu yang bermasalah dalam tata kelola) untuk menguji apakah paradigma yang sama menghasilkan	pengumuman di SPOT (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh rubrik esai, membaca balikan dosen atas peta konsep kelompok, dan menyelesaikan draf esai individu; mahasiswa menggunakan aplikasi Generative AI (Claude atau ChatGPT sesuai Pedoman AI Generatif Etis UNISAN) hanya untuk mengeksplorasi definisi konsep atau mencari sudut pandang alternatif, bukan untuk menghasilkan argumen utama esai MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa secara individual mengembangkan argumen analitis tentang	• Kriteria penilaian relevansi paradigma: kesesuaian asumsi dengan konteks empiris, kemampuan penjelasan, dan orientasi nilai; • Sintesis Sub-CPMK2: dari klasifikasi menuju penilaian kritis berbasis kasus; Pustaka: Syafiie (2011); Heywood (2013); Hague, Harrop, & McCormick (2016); Budiardjo (2008).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			tanggapan kritis terhadap pilihan paradigma kelompok lain dengan merujuk pada argumen dari bacaan; penilaian mencakup kualitas argumen, bukan sekadar frekuensi berbicara Tugas: Esai analitis individual (500-700 kata, format PDF) diunggah ke SPOT UNISAN sebelum kelas dimulai; esai wajib memuat daftar referensi minimal 2 sumber dari pustaka utama yang dikutip dalam teks	analisis dan rekomendasi yang berbeda Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menulis esai analitis individual yang: (1) mengklasifikasikan tiga paradigma utama ilmu pemerintahan (normatif, empiris, kritis) beserta asumsi dasarnya menggunakan referensi pustaka yang dikutip secara eksplisit, (2) memilih satu gejala pemerintahan konkret di Kawasan Timur Indonesia (misalnya pelayanan publik di daerah terpencil, pengelolaan dana desa, atau konflik kewenangan pemerintah daerah), dan (3) menilai paradigma mana yang paling relevan untuk menganalisis gejala tersebut beserta alasan yang didukung argumen dari bacaan; esai tidak boleh sekadar	relevansi paradigma untuk kasus lokal pilihan mereka sebagai bagian dari proyek pemahaman bertahap yang akan terus dibangun dalam topik-topik berikutnya Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				mendefinisikan paradigma tetapi harus menunjukkan penilaian kritis Deliverable: Esai analitis individual (500-700 kata, format PDF) beserta daftar referensi minimal 2 sumber pustaka utama yang dikutip dalam teks; diunggah ke SPOT UNISAN sebelum sesi kelas minggu ke-4 dimulai			
5,6	Sub-CPMK3: Menganalisis relasi ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu dengan mengidentifikasi titik temu, perbedaan, dan kontribusi lintas disiplin tersebut melalui studi literatur komparatif.	Mahasiswa mampu: • Mengidentifikasi titik temu objek kajian ilmu pemerintahan dengan ilmu politik dan sosiologi berdasarkan literatur minimal tiga tokoh yang relevan • Membedakan fokus analitis ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan sosiologi dalam menelaah fenomena kekuasaan dan negara secara	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formatif di minggu ini; penilaian dilakukan melalui partisipasi diskusi dan tugas pemetaan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelas	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi presentasi singkat draf peta konsep oleh dua hingga tiga kelompok kecil, diikuti diskusi pleno untuk menyintesis perbedaan dan persamaan perspektif antar-disiplin (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan draf peta konsep, memberikan umpan balik teman	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan bacaan terpilih (petikan Syafiie, Heywood, dan Hague et al.) ke SPOT UNISAN disertai panduan membaca berstruktur berupa tiga pertanyaan pemandu tentang relasi antar-disiplin (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca mandiri bahan yang	Bahan Kajian: • Relasi objek kajian ilmu pemerintahan dengan ilmu politik: persamaan dan perbedaan fokus analitis; • Sosiologi sebagai perspektif analisis pemerintahan: struktur sosial, institusi, dan legitimasi; • Kontribusi filsafat ilmu dalam menegaskan batas dan metode ilmu	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		komparatif • Menjelaskan kontribusi sosiologi sebagai perspektif analisis terhadap gejala pemerintahan dengan mengacu pada konsep struktur sosial dan legitimasi • Menghubungkan pendekatan filsafat ilmu (ontologi, aksiologi) yang dikaji minggu sebelumnya dengan posisi epistemologis ilmu pemerintahan di antara disiplin-disiplin yang berkaitan	dinilai berdasarkan relevansi argumen dengan teks literatur, kesediaan mengutip sumber secara jujur (Integrity), dan kemampuan merespons pendapat berbeda secara konstruktif Tugas: Peta konsep lintas disiplin (diagram hubungan) disertai catatan penjelasan minimal 300 kata yang menggambarkan titik temu dan perbedaan ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan sosiologi; dikumpulkan via SPOT UNISAN sebelum	sejawat, lalu merevisi peta konsep berdasarkan masukan diskusi kelas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok mendiskusikan kasus yang sama dari tiga sudut pandang disiplin berbeda, kemudian menarik simpulan tentang kontribusi masing-masing disiplin terhadap analisis pemerintahan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual menyusun peta konsep yang menggambarkan relasi ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu. Peta konsep harus memuat minimal delapan simpul konsep, garis penghubung berlabel (titik temu, perbedaan,	diunggah, mengisi lembar refleksi digital di SPOT UNISAN, dan menyiapkan draf peta konsep sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menelaah satu kasus gejala pemerintahan lokal Kawasan Timur Indonesia (misalnya pola rekrutmen kepala daerah) dan mengidentifikasi disiplin mana yang paling relevan untuk menganalisisnya, kemudian mendiskusikan pilihan tersebut di forum daring SPOT UNISAN Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	pemerintahan; • Studi literatur komparatif lintas disiplin sebagai metode memahami gejala pemerintahan; Pustaka: Syafiie (2011); Heywood (2013); Hague, Harrop, & McCormick (2016); Budiardjo (2008).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pertemuan minggu ke-6 kontribusi), dan catatan penjelasan yang mengutip minimal dua pustaka dari daftar yang ditetapkan. Mahasiswa diperbolehkan menggunakan aplikasi AI Generatif sebagai alat eksplorasi awal konsep, namun setiap klaim dalam catatan penjelasan wajib disertai rujukan sumber yang dapat diverifikasi sesuai Pedoman Penggunaan AI Generatif Etis UNISAN. Deliverable: Satu file peta konsep (format PDF atau gambar resolusi tinggi) beserta catatan penjelasan minimal 300 kata dalam dokumen terpisah, diunggah ke SPOT UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-6				
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memimpin sesi presentasi kelompok (masing-masing 8 menit)	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi diskusi asinkron di SPOT UNISAN dengan	Bahan Kajian: • Studi literatur komparatif sebagai metode analisis relasi	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kuis tertulis singkat (15 menit) berupa dua pertanyaan analisis pendek: (1) membedakan perspektif ilmu politik dan sosiologi dalam kasus yang diberikan, dan (2) menjelaskan kontribusi filsafat ilmu terhadap ilmu pemerintahan; dinilai berdasarkan ketepatan konsep, kejelasan argumen, dan penggunaan terminologi yang benar Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan presentasi kelompok dinilai berdasarkan	dan tanya jawab terbimbing; di akhir sesi dosen menyajikan sintesis tentang kontribusi lintas disiplin sebagai jembatan menuju materi kerangka epistemologis minggu ke-7 (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan hasil analisis komparatif kelompok, merespons pertanyaan dari kelompok lain dan dosen, lalu mencatat poin sintesis untuk digunakan dalam penulisan makalah individual MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: setiap kelompok mempertahankan pilihan perspektif disiplin yang paling relevan untuk kasusnya dengan argumen berbasis literatur,	mengunggah panduan penulisan makalah analisis lintas disiplin dan rubrik penilaian; memberikan umpan balik tertulis atas draf peta konsep yang dikumpulkan minggu ke-5 (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca umpan balik dosen, merevisi peta konsep bila diperlukan, dan mulai mengerjakan draf makalah dengan mengakses regulasi dan dokumen kebijakan daerah melalui JDIH atau lembaran negara daring sebagai bahan kasus empiris MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa memilih satu kasus pemerintahan	antar-disiplin ilmu pemerintahan; • Kontribusi ilmu politik terhadap ilmu pemerintahan: konsep kekuasaan, otoritas, dan legitimasi; • Kontribusi sosiologi terhadap ilmu pemerintahan: struktur sosial, institusi, dan hubungan masyarakat-negara; • Kontribusi filsafat ilmu terhadap ilmu pemerintahan: landasan epistemologis dan batas disiplin; • Penerapan perspektif lintas disiplin pada kasus pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Syafiie (2011); Heywood (2013); Hague, Harrop,	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kedalaman analisis komparatif, kemampuan menjawab pertanyaan berbasis teks, dan penampilan sikap ilmiah yang jujur dalam menyebut sumber (Integrity) serta keterbukaan terhadap perspektif berbeda (Harmony) Tugas: Makalah analisis lintas disiplin individual, minimal 800 kata dan maksimal 1.200 kata, menggunakan minimal tiga pustaka yang ditetapkan, dengan satu studi kasus pemerintahan	kemudian kelas bersama menarik implikasi untuk tata kelola pemerintahan yang berkeadilan (Nationalism, Service) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual menyusun makalah analisis komparatif lintas disiplin yang mengkaji satu gejala pemerintahan aktual di Kawasan Timur Indonesia. Makalah memuat: (1) identifikasi masalah pemerintahan yang dipilih, (2) analisis dari perspektif ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu secara berurutan, (3) sintesis titik temu dan perbedaan ketiga perspektif, dan (4) refleksi tentang perspektif mana yang paling produktif untuk kasus tersebut beserta alasannya. Setiap klaim analitis harus disertai rujukan pustaka	aktual dari Kawasan Timur Indonesia (misalnya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten tertentu), lalu menganalisisnya secara tertulis menggunakan tiga lensa disiplin sekaligus Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	& McCormick (2016); Budiardjo (2008); Rodee, Anderson, Christol, & Greene (1983).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			aktual sebagai objek analisis; dikumpulkan via SPOT UNISAN paling lambat tujuh hari setelah pertemuan	yang dapat diverifikasi. Penggunaan AI Generatif hanya diperbolehkan untuk eksplorasi awal, dengan kewajiban mencantumkan pernyataan penggunaan sesuai Pedoman UNISAN. Deliverable: Satu makalah analisis individual dalam format PDF, panjang 800 hingga 1.200 kata (tidak termasuk daftar pustaka), diunggah ke SPOT UNISAN paling lambat tujuh hari setelah pertemuan minggu ke-6; disertai pernyataan orisinalitas singkat satu paragraf			
7	Sub-CPMK4: Menyusun kerangka epistemologis ilmu pemerintahan secara terpadu—mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi—sebagai landasan untuk menganalisis satu gejala pemerintahan aktual, sebagai persiapan UTS.	Mahasiswa mampu: • Menyusun kerangka epistemologis ilmu pemerintahan yang memuat komponen ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara terpadu dan konsisten dalam satu dokumen	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes terpisah di minggu ini; penilaian terintegrasi melalui tugas portofolio	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan ulasan singkat keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang telah dipelajari sejak minggu ke-3, kemudian memfasilitasi presentasi draf kerangka epistemologis oleh	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah template terstruktur kerangka epistemologis ke SPOT UNISAN beserta contoh pengisian parsial dan panduan penggunaan SIPERTI atau sumber regulasi daring untuk menemukan	Bahan Kajian: • Sintesis ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai kerangka terpadu ilmu pemerintahan; • Hubungan antara paradigma normatif, empiris, dan kritis	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terstruktur • Menerapkan kerangka epistemologis yang disusun untuk menganalisis satu gejala pemerintahan aktual, dengan menunjukkan bagaimana ketiga komponen saling menopang dalam proses analisis • Mengintegrasikan temuan dari kajian lintas disiplin (minggu ke-5 dan ke-6) ke dalam kerangka epistemologis sebagai landasan yang koheren untuk analisis pemerintahan • Mengevaluasi kesesuaian dan keterbatasan kerangka epistemologis yang dikonstruksi dalam menjelaskan kompleksitas gejala	kerangka epistemologis yang menjadi bahan UTS; kisi-kisi UTS dibagikan pada sesi ini mencakup kemampuan menganalisis relasi disiplin (Sub-CPMK3) dan menyusun kerangka epistemologis (Sub-CPMK4) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi presentasi dan diskusi kritis dinilai berdasarkan kemampuan mempertahankan argumen epistemologis dengan bukti tekstual, keterbukaan merevisi kerangka	perwakilan mahasiswa (sukarela atau acak) diikuti umpan balik konstruktif kelas; sesi ditutup dengan penjelasan cakupan dan format UTS (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan draf kerangka, menerima dan memberikan umpan balik teman sejawat, lalu merevisi draf berdasarkan masukan; mahasiswa mencatat peta konsep akhir yang menghubungkan seluruh materi sejak minggu ke-1 sebagai persiapan UTS MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: presentasi dan review teman sejawat atas draf kerangka epistemologis; mahasiswa menunjukkan secara konkret bagaimana	data gejala pemerintahan aktual sebagai objek analisis (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh template, menelaah contoh, mengakses dokumen regulasi dan data kebijakan daerah melalui JDIH atau lembaran negara daring, lalu menyusun draf kerangka epistemologis sebelum sesi luring; draf diunggah ke forum SPOT UNISAN untuk diperiksa teman sejawat MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mengembangkan kerangka epistemologis sebagai produk intelektual personal yang akan dipertahankan dalam sesi luring dan	dengan pilihan epistemologis dalam analisis pemerintahan; • Integrasi kontribusi ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu ke dalam kerangka epistemologis ilmu pemerintahan; • Penerapan kerangka epistemologis terpadu untuk menganalisis gejala pemerintahan aktual; • Persiapan UTS: peta konsep integratif materi minggu ke-1 hingga ke-7; Pustaka: Syafiie (2011); Heywood (2013); Hague, Harrop, & McCormick (2016); Budiardjo (2008); Rodee, Anderson, Christol, & Greene (1983).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintahan yang dipilih	berdasarkan masukan (Adaptability), dan kemampuan menghubungkan konsep dengan konteks pemerintahan nyata Tugas: Dokumen kerangka epistemologis terpadu individual, minimal 1.000 kata dan maksimal 1.500 kata, memuat tabel atau diagram komponen ontologi-epistemologi-aksiologi disertai narasi penjelasan dan satu contoh analisis gejala pemerintahan aktual; dikumpulkan via	kerangka yang mereka susun dapat diterapkan pada satu gejala pemerintahan aktual pilihan mereka, mendorong kreativitas orisinal dalam memilih dan menginterpretasi kasus lokal (Creativity) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual menyusun dokumen kerangka epistemologis terpadu ilmu pemerintahan yang merangkum dan mengintegrasikan seluruh pemahaman dari pertemuan pertama hingga ketujuh. Dokumen memuat: (1) tabel atau diagram komponen ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pemerintahan beserta penjelasan masing-masing komponen, (2) uraian tentang bagaimana ketiga	menjadi landasan analisis pada UTS Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			SPOT UNISAN sebelum jadwal UTS	paradigma (normatif, empiris, kritis) yang telah dipelajari merefleksikan pilihan epistemologis yang berbeda, (3) sintesis kontribusi ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu terhadap kerangka tersebut, dan (4) penerapan kerangka untuk menganalisis satu gejala pemerintahan aktual, disertai argumen tentang relevansi dan keterbatasan kerangka yang digunakan. Kerangka ini sekaligus berfungsi sebagai catatan persiapan UTS. Seluruh klaim harus didukung rujukan pustaka yang terverifikasi; penggunaan AI Generatif wajib dinyatakan dan tidak menggantikan analisis kritis mahasiswa. Deliverable: Satu dokumen kerangka epistemologis terpadu dalam format PDF, panjang 1.000 hingga 1.500 kata (tidak termasuk tabel, diagram, dan daftar			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pustaka), diunggah ke SPOT UNISAN paling lambat dua hari sebelum jadwal UTS; tabel atau diagram wajib disertakan sebagai bagian dari dokumen yang sama			
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester : Cakupan: Sub-CPMK1–Sub-CPMK4						
9,10	Sub-CPMK5: Menjelaskan konsep negara, pemerintah, dan pemerintahan serta membandingkan teori-teori legitimasi kekuasaan dari perspektif klasik dan kontemporer.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan perbedaan konseptual antara negara, pemerintah, dan pemerintahan berdasarkan minimal tiga sumber pustaka utama secara tepat - Mengidentifikasi unsur-unsur negara (wilayah, penduduk, pemerintah, kedaulatan) dan mengaitkannya dengan konteks Indonesia secara faktual - Menguraikan teori legitimasi kekuasaan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis isian singkat dan jawaban pendek yang menguji ketepatan definisi negara, pemerintah, dan pemerintahan serta identifikasi tipe legitimasi kekuasaan klasik; dinilai berdasarkan keakuratan konsep dan kelengkapan argumen	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan pemetaan jawaban prapembelajaran mahasiswa di papan tulis, kemudian memandu diskusi kelas untuk mengklarifikasi perbedaan konseptual negara-pemerintah-pemerintahan dan menegaskan kerangka legitimasi Weber secara sistematis (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan temuan kasus prapembelajaran secara berpasangan, mendiskusikan kesesuaian	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video mini-lecture berdurasi 15-20 menit di SPOT UNISAN yang memaparkan peta konsep negara, pemerintah, dan pemerintahan serta tiga tipe legitimasi Weber, dilengkapi anotasi pada slide untuk navigasi mandiri mahasiswa (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh bahan bacaan dari SPOT UNISAN, menyimak video mini-lecture, dan mengisi lembar refleksi digital yang memuat tiga	Bahan Kajian: - Perbedaan konseptual negara, pemerintah, dan pemerintahan; - Unsur-unsur negara dan relevansinya bagi Indonesia; - Teori legitimasi kekuasaan klasik: tradisional, kharismatik, dan rasional-legal (Weber); - Contoh historis basis legitimasi pada rezim pemerintahan yang berbeda; Pustaka:	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		klasik (tradisional, kharismatik, rasional-legal) beserta contoh historis yang relevan • Membedakan basis legitimasi kekuasaan pada rezim pemerintahan yang berbeda menggunakan argumen berbasis bukti	Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam tanya-jawab kelas, kemampuan menyampaikan pendapat secara santun dan berbasis sumber, serta kejujuran dalam mengakui keterbatasan pemahaman (Integrity) Tugas: Catatan bacaan terstruktur (reading notes) dari dua sumber utama yang menguraikan perbedaan konsep negara-pemerintah-pemerintahan dan minimal dua teori legitimasi klasik;	tipe legitimasi yang diidentifikasi, lalu menerima umpan balik langsung dari dosen dan sesama mahasiswa MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: diskusi kasus peralihan kekuasaan yang telah disiapkan mahasiswa secara mandiri, dengan panduan pertanyaan analitis dari dosen untuk mengarahkan penalaran dari deskripsi menuju identifikasi tipe legitimasi yang tepat Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa membuat catatan bacaan terstruktur dengan membaca minimal dua pustaka utama (Syafiie 2011 dan Heywood 2013 atau Budiardjo 2008), kemudian menyusun	pertanyaan panduan sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri mencari satu contoh kasus peralihan kekuasaan di Indonesia (misalnya transisi Orde Baru ke Reformasi) dan mengidentifikasi tipe legitimasi yang terlibat, hasilnya diunggah sebagai tugas prapembelajaran di SPOT UNISAN Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Syafiie, I. K. (2011); Budiardjo, M. (2008); Heywood, A. (2013); Rodee, C. C., Anderson, T. J., Christol, C. Q., & Greene, T. H. (1983).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			maksimal 600 kata, dikumpulkan melalui SPOT UNISAN	uraian yang membandingkan definisi negara, pemerintah, dan pemerintahan menurut masing-masing sumber serta mengidentifikasi tipe legitimasi kekuasaan klasik yang relevan dengan konteks pemerintahan Indonesia; semua kutipan wajib disertai halaman sumber sebagai wujud Integrity akademik Deliverable: Dokumen catatan bacaan terstruktur dalam format PDF, maksimal 600 kata, memuat tabel perbandingan definisi (minimal 2 sumber) dan uraian tipe legitimasi disertai contoh, dikumpulkan melalui SPOT UNISAN sebelum sesi luring minggu 9			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memandu diskusi panel kelas berbasis studi kasus yang telah disiapkan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan bacaan komparatif teori legitimasi	Bahan Kajian: • Teori legitimasi kontemporer: legitimasi demokratis,	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Ujian tulis singkat (take-home atau in-class) berbobot 14% yang menguji kemampuan membandingkan teori legitimasi klasik dan kontemporer serta menganalisis kasus krisis legitimasi; dinilai berdasarkan rubrik: kedalaman analisis komparatif (40%), ketepatan penggunaan konsep (30%), kualitas argumen berbasis bukti (20%), dan kejujuran pengutipan sumber (10%) Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi argumentatif	mahasiswa, mengajukan pertanyaan pendalaman untuk mendorong perbandingan antar-teori legitimasi, dan memberikan penguatan konseptual di akhir sesi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan analisis kasus masing-masing dalam format diskusi panel kelompok kecil, saling memberikan tanggapan kritis, lalu menyintesis temuan untuk memperkuat argumen dalam makalah akhir MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: diskusi panel berbasis kasus krisis legitimasi pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia, dengan rubrik penilaian partisipasi yang mengukur	kontemporer di SPOT UNISAN disertai panduan analisis studi kasus dalam bentuk lembar kerja digital yang memuat kerangka pertanyaan analitis (what, why, how, so what) (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca bahan bacaan dan mengisi lembar kerja digital secara mandiri, kemudian mengakses dokumen kebijakan atau berita daerah yang relevan melalui JDIH atau sumber daring terpercaya sebagai bahan dasar studi kasus MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri mengidentifikasi satu kasus krisis	konstitusional, dan berbasis kinerja; • Perbandingan asumsi dasar teori legitimasi klasik dan kontemporer; • Krisis legitimasi dan dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan; • Analisis kasus krisis legitimasi pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Heywood, A. (2013); Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2016); Syafiie, I. K. (2011); Budiardjo, M. (2008).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dalam diskusi studi kasus, kemampuan merespons pandangan berbeda secara kritis namun menghargai perspektif sesama (Harmony), serta keberanian menyampaikan analisis orisinal tentang konteks lokal Kawasan Timur Indonesia (Creativity) Tugas: Makalah analisis studi kasus krisis legitimasi pada satu unit pemerintahan daerah di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia, menggunakan minimal dua teori legitimasi;	kedalaman argumen komparatif dan kepekaan terhadap konteks lokal (Service, Nationalism) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menyusun makalah analisis yang memilih satu kasus krisis legitimasi pada unit pemerintahan daerah di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia (misalnya kasus pemilihan kepala daerah yang disengketakan atau kebijakan yang ditolak masyarakat), menganalisisnya menggunakan minimal dua teori legitimasi yang telah dipelajari di minggu 9 dan 10, kemudian menarik implikasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat setempat; seluruh sumber wajib dikutip secara konsisten sebagai wujud	legitimasi pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia dari sumber daring yang dapat diverifikasi, mengisi lembar kerja analisis, dan mengunggahnya ke SPOT UNISAN sebagai bahan diskusi sesi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			panjang 800-1.000 kata, dikumpulkan melalui SPOT UNISAN	Integrity akademik Deliverable: Makalah analisis studi kasus dalam format PDF, 800-1.000 kata, memuat: identifikasi kasus, kerangka teori yang digunakan, analisis komparatif, dan implikasi kebijakan; dilengkapi daftar pustaka format APA; dikumpulkan melalui SPOT UNISAN sebelum penutupan minggu 10			
11,12	Sub-CPMK6: Menganalisis fungsi-fungsi pemerintahan (pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan) melalui studi kasus nyata pada unit pemerintahan daerah di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia menggunakan pendekatan Case-Based Learning.	Mahasiswa mampu: • Menjelaskan tiga fungsi pemerintahan (pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan) beserta karakteristik dan instrumen pelaksanaannya secara tepat • Mengidentifikasi landasan yuridis fungsi pemerintahan daerah	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini; penilaian dilakukan melalui kualitas lembar identifikasi kasus yang menjadi dasar analisis minggu 12	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memaparkan kerangka konseptual tiga fungsi pemerintahan melalui kuliah interaktif, mengaitkan setiap fungsi dengan pasal-pasal relevan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian memandu sesi konsultasi kelompok untuk verifikasi kelayakan kasus yang dipilih mahasiswa (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan bacaan tentang tiga fungsi pemerintahan di SPOT UNISAN, disertai salinan digital ketentuan yang relevan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan panduan pemilihan kasus yang memuat kriteria kelayakan kasus (unit pemerintahan nyata, data dapat diakses, relevan dengan Kawasan	Bahan Kajian: • Tiga fungsi pemerintahan: pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah; • Landasan yuridis fungsi pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; • Karakteristik dan instrumen pelaksanaan fungsi pemerintahan di	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Membedakan perwujudan ketiga fungsi pemerintahan pada konteks unit pemerintahan daerah di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia dengan memberikan contoh konkret • Memilih kasus pemerintahan daerah yang relevan sebagai objek analisis fungsi pemerintahan pada sesi lanjutan (minggu 12)	Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok berbasis kasus awal, kemampuan mengajukan pertanyaan kritis tentang kesenjangan antara fungsi ideal dan praktik pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia, serta kesediaan berbagi perspektif secara terbuka (Harmony, Adaptability) Tugas: Lembar identifikasi kasus (case identification sheet) untuk satu unit pemerintahan daerah di	Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok kecil (3-4 orang) mempresentasikan calon kasus secara singkat (2-3 menit per kelompok), menerima umpan balik dari dosen tentang kelayakan dan relevansi kasus, serta menyepakati fokus analisis untuk minggu 12 MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: sesi konsultasi kelompok untuk penetapan kasus, dengan diskusi terarah yang mendorong mahasiswa mempertimbangkan dimensi Service (orientasi pada kepentingan masyarakat) dan Nationalism (keberpihakan pada pemerataan tata kelola di kawasan timur) dalam pemilihan kasus	Timur Indonesia) (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca bahan bacaan, menelusuri regulasi melalui JDIH atau SIPERTI, dan melakukan eksplorasi awal calon kasus pemerintahan daerah yang akan dianalisis pada minggu 12; boleh menggunakan aplikasi Generative AI untuk eksplorasi konsep awal namun analisis dan penentuan kasus wajib bersumber dari dokumen resmi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: eksplorasi mandiri calon kasus berbasis regulasi dan dokumen kebijakan resmi, dengan panduan kriteria dari dosen untuk memastikan relevansi	tingkat daerah; • Identifikasi konteks dan kasus pemerintahan daerah di Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Syafiie, I. K. (2011); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2016); Kaho, Josef Riwu. (2012).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia, memuat: nama unit pemerintahan, tiga fungsi yang akan dianalisis, sumber data/dokumen yang akan digunakan; maksimal 400 kata, dikumpulkan melalui SPOT UNISAN	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa dalam kelompok kecil (3-4 orang) menyusun lembar identifikasi kasus yang mencantumkan: nama dan gambaran singkat unit pemerintahan daerah yang dipilih di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia, tiga fungsi pemerintahan (pelayanan, pemberdayaan, pembangunan) yang akan dianalisis beserta alasan pemilihan, sumber data dan dokumen kebijakan yang akan diakses (termasuk peraturan daerah atau laporan kinerja), serta rencana pembagian kerja kelompok; lembar ini menjadi dasar pengerjaan analisis mendalam pada minggu 12 Deliverable: Lembar identifikasi kasus (case identification sheet) dalam	kasus dengan ketiga fungsi pemerintahan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				format PDF, maksimal 400 kata, dilengkapi tabel rencana analisis dan daftar sumber dokumen yang akan digunakan; dikumpulkan melalui SPOT UNISAN sebelum penutupan minggu 11			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Penilaian tertulis berbobot 14% berupa laporan analisis studi kasus kelompok yang dinilai menggunakan rubrik: kedalaman analisis fungsi pemerintahan (30%), ketepatan penggunaan konsep dan regulasi (25%), kualitas rekomendasi berbasis bukti (25%), dan konsistensi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi kelompok di mana setiap kelompok memaparkan analisis kasus (8-10 menit) dan menerima tanggapan dari kelompok lain serta dosen; dosen memberikan penguatan konseptual dan umpan balik spesifik per kelompok di akhir sesi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Setiap kelompok mempresentasikan matriks analisis fungsi pemerintahan, kesenjangan yang ditemukan, dan rekomendasi kebijakan;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rubrik penilaian laporan dan presentasi di SPOT UNISAN, disertai contoh matriks analisis fungsi pemerintahan yang telah diisi parsial sebagai panduan penyusunan laporan; memberikan umpan balik tertulis atas lembar identifikasi kasus yang dikumpulkan pada minggu 11 (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok mengakses dokumen kebijakan, laporan kinerja	Bahan Kajian: • Analisis komparatif perwujudan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan pada pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia; • Evaluasi kesenjangan antara fungsi ideal dalam regulasi dan praktik aktual pemerintahan daerah; • Rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penguatan fungsi pemerintahan daerah;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pengutipan sumber/Integrity akademik (20%) Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi aktif dalam sesi presentasi dan tanya-jawab antarkelas, kemampuan memberikan tanggapan kritis yang konstruktif terhadap analisis kelompok lain (Harmony), serta keberanian menyajikan temuan orisinal tentang konteks lokal Kawasan Timur Indonesia (Creativity, Nationalism) Tugas: Laporan analisis studi kasus	kelompok lain memberikan tanggapan terstruktur menggunakan kartu komentar yang memuat poin apresiasi dan pertanyaan kritis MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dan Project-Based Learning: presentasi hasil analisis studi kasus dengan sesi tanya-jawab antarkelas yang mendorong sintesis pemahaman; dimensi Service dan Nationalism dinilai melalui orientasi rekomendasi pada kepentingan masyarakat Kawasan Timur Indonesia dan keberpihakannya pada penguatan tata kelola yang berkeadilan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok menyusun laporan analisis studi kasus	pemerintahan daerah, dan regulasi terkait melalui JDIH, SIPERTI, atau situs resmi pemerintah daerah; menyusun draf laporan analisis dan menyiapkan bahan presentasi berbasis data yang dapat diverifikasi MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: pengembangan laporan analisis studi kasus berbasis dokumen nyata, dengan penekanan pada penggunaan literasi digital secara etis sesuai Pedoman Penggunaan AI Generatif Etis UNISAN — aplikasi Generative AI boleh digunakan untuk membantu strukturisasi argumen namun bukan sebagai pengganti analisis kritis kelompok	• Dinamika tata kelola pemerintahan daerah di Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Syafiie, I. K. (2011); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; Kaho, Josef Riwu. (2012); Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2016).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kelompok yang merupakan pengembangan dari lembar identifikasi kasus minggu 11; panjang 1.200-1.500 kata, dilengkapi matriks analisis fungsi pemerintahan dan rekomendasi kebijakan; dikumpulkan melalui SPOT UNISAN	yang merupakan pengembangan mendalam dari lembar identifikasi kasus minggu 11; laporan memuat: gambaran singkat unit pemerintahan daerah yang dikaji, analisis perwujudan tiga fungsi pemerintahan (pelayanan, pemberdayaan, pembangunan) menggunakan matriks analisis, evaluasi kesenjangan antara fungsi ideal menurut regulasi dan praktik aktual berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi, serta rekomendasi kebijakan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal Kawasan Timur Indonesia; seluruh data dan dokumen wajib dikutip secara jujur sebagai wujud Integrity Deliverable: Laporan analisis studi kasus dalam format PDF, 1.200-1.500 kata, memuat matriks	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				analisis fungsi pemerintahan (tabel 3 fungsi x indikator capaian x realitas kasus x kesenjangan), narasi evaluatif, dan rekomendasi kebijakan minimal 3 poin; dilengkapi daftar pustaka dan lampiran sumber dokumen yang digunakan; dikumpulkan melalui SPOT UNISAN pada hari presentasi atau paling lambat 24 jam setelah sesi luring minggu 12			
13,14	Sub-CPMK7: Mengevaluasi dinamika relasi antara negara dan masyarakat sipil dalam konteks tata kelola pemerintahan demokratis dengan menggunakan minimal 2 perspektif teoritik yang berbeda.	Mahasiswa mampu: • Mengidentifikasi konsep masyarakat sipil dari minimal dua perspektif teoritik (pluralis dan neo-Gramscian) beserta asumsi dasarnya • Menganalisis dinamika relasi negara-masyarakat sipil dalam konteks tata kelola pemerintahan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formatif pada minggu ini; penilaian dilakukan melalui diskusi kelompok dan lembar kerja analisis Partisipasi kelas & laboratorium:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan klarifikasi singkat (10 menit) atas miskonsepsi yang muncul di forum daring; dosen memfasilitasi diskusi kelompok (4-5 mahasiswa) yang mempresentasikan analisis kasus masing-masing kelompok; dosen memberikan umpan balik formatif dan menutup dengan konsolidasi konseptual (tatap muka di	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video kuliah ringkas (20-25 menit) di SPOT UNISAN yang memaparkan konsep masyarakat sipil, dua perspektif teoritik (pluralis dan neo-Gramscian), serta contoh kasus relasi negara-masyarakat di Indonesia; dosen membuka forum diskusi asinkron dengan pertanyaan pemantik	Bahan Kajian: • Konsep masyarakat sipil: definisi, fungsi, dan posisinya dalam sistem pemerintahan demokratis; • Perspektif pluralis tentang relasi negara-masyarakat sipil: distribusi kekuasaan dan kelompok kepentingan; • Perspektif neo-Gramscian tentang relasi	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		demokratis menggunakan dua perspektif yang dipilih • Membandingkan pola relasi negara-masyarakat sipil pada kasus konkret pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia berdasarkan data dan regulasi yang dapat diverifikasi • Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing perspektif dalam menjelaskan fenomena partisipasi masyarakat pada konteks lokal yang dikaji	Keaktifan menyampaikan argumen berbasis sumber terverifikasi dalam sesi diskusi kelompok, kejelasan penggunaan dua perspektif teoritik, dan sikap menghargai pendapat berbeda (Harmony); dinilai dengan rubrik partisipasi 4 skala Tugas: Lembar Kerja Analisis individual (600-800 kata): peta konsep relasi negara-masyarakat sipil berisi dua perspektif teoritik, identifikasi kasus empiris dari satu daerah di	kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa membawa hasil eksplorasi kasus yang disiapkan secara daring; kelompok menyusun bersama satu bagan komparatif dua perspektif berdasarkan kasus yang dipilih dan mempresentasikannya di depan kelas; mahasiswa mencatat umpan balik dosen untuk perbaikan Lembar Kerja Analisis MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: diskusi panel kelompok di mana tiap kelompok mempertahankan analisis kasusnya menggunakan argumen teoritik; kelas melakukan evaluasi silang terhadap ketepatan penggunaan perspektif dan keabsahan sumber yang dikutip (mencerminkan	tentang kasus partisipasi masyarakat di salah satu daerah Kawasan Timur Indonesia (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses video kuliah dan bahan bacaan wajib melalui SPOT UNISAN; mahasiswa mengumpulkan satu contoh dokumen kebijakan atau berita resmi terkait partisipasi masyarakat di daerah Kawasan Timur Indonesia (sumber: JDIH atau situs resmi pemerintah daerah) sebagai bahan analisis; mahasiswa merespons forum diskusi dengan argumen yang mengacu pada minimal satu sumber pustaka MP — Metode Pembelajaran:	negara-masyarakat sipil: hegemoni, kontra-hegemoni, dan ruang publik; • Dinamika partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia; • Evaluasi komparatif dua perspektif teoritik dalam menjelaskan fenomena partisipasi lokal; Pustaka: Heywood, A. (2013); Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2016); Budiardjo, M. (2008); Syafiie, I. K. (2011); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kawasan Timur Indonesia, dan penilaian komparatif kedua perspektif; dikumpulkan di SPOT UNISAN paling lambat 48 jam setelah pertemuan	nilai Integrity dalam mengutip sumber berbasis bukti) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual menyusun Lembar Kerja Analisis yang mengidentifikasi satu kasus konkret relasi negara-masyarakat sipil di salah satu kabupaten/kota Kawasan Timur Indonesia (misalnya pelibatan masyarakat adat dalam musyawarah desa atau forum konsultasi publik rencana tata ruang). Analisis wajib menggunakan minimal dua perspektif teoritik yang berbeda (perspektif pluralis dan neo-Gramscian atau perspektif yang dikaji di kelas), membandingkan kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam menjelaskan kasus tersebut, serta	Case-Based Learning: mahasiswa secara individual menganalisis kasus partisipasi masyarakat sipil pada satu daerah di Kawasan Timur Indonesia, lalu membandingkan temuannya menggunakan dua perspektif teoritik yang diajarkan, sebelum sesi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyertakan kutipan sumber yang dapat diverifikasi. Penggunaan AI generatif diperbolehkan untuk eksplorasi konsep awal, namun analisis dan argumen final wajib merupakan hasil pemikiran kritis mahasiswa sendiri sesuai Pedoman Penggunaan AI Generatif Etis UNISAN. Deliverable: Satu file Lembar Kerja Analisis dalam format PDF (600-800 kata) berisi: (1) deskripsi singkat kasus empiris beserta sumber dokumen, (2) analisis kasus menggunakan dua perspektif teoritik dalam format tabel komparatif, dan (3) evaluasi kritis tentang perspektif mana yang lebih relevan untuk konteks lokal yang dipilih beserta alasannya; dikumpulkan melalui SPOT UNISAN			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes sumatif tertulis pada minggu ini; penilaian utama dilakukan melalui esai evaluatif yang merupakan bagian dari bobot 14% Partisipasi kelas & laboratorium: Keterlibatan aktif dalam sesi presentasi dan umpan balik antarmahasiswa: ketepatan menggunakan konsep dari dua perspektif teoritik, kemampuan memberikan kritik konstruktif berbasis argumen (bukan opini	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan tinjauan singkat kriteria esai evaluatif dan kesalahan umum dalam menggunakan perspektif teoritik; dosen memfasilitasi sesi presentasi singkat (5-7 menit per kelompok kecil) di mana mahasiswa memaparkan argumen inti esai mereka untuk mendapat umpan balik sejawat; dosen memberikan umpan balik substantif dan menutup dengan sintesis tentang nilai-nilai tata kelola demokratis yang berintegritas (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa membawa draf esai evaluatif dan mempresentasikan argumen utamanya; mahasiswa memberikan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penulisan esai evaluatif di SPOT UNISAN beserta rubrik penilaian yang transparan; dosen membuka sesi konsultasi daring asinkron melalui forum SPOT UNISAN untuk mahasiswa yang memerlukan klarifikasi kerangka argumen atau pemilihan kasus (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses data kepemiluan lokal (hasil Pilkada atau Pemilu legislatif) dari sumber resmi (KPU atau JDIH) sebagai basis empiris esai; mahasiswa menelaah kembali bahan Minggu 13 dan memperluas analisis ke dimensi kepemiluan; mahasiswa	Bahan Kajian: • Dinamika demokrasi dan kepemiluan lokal-nasional: konsep, mekanisme, dan aktor; • Partisipasi masyarakat dalam kepemiluan sebagai bentuk relasi negara-masyarakat sipil; • Penerapan perspektif pluralis dan neo-Gramscian pada analisis kepemiluan lokal di Kawasan Timur Indonesia; • Evaluasi kualitas tata kelola pemerintahan demokratis berbasis bukti empiris data kepemiluan; • Integritas akademik dan kejujuran sumber dalam penulisan esai evaluatif ilmu pemerintahan; Pustaka:	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			tanpa dasar), dan kejujuran akademik dalam mengakui keterbatasan analisis sendiri (Integrity); dinilai dengan rubrik diskusi 4 skala Tugas: Esai Evaluatif individual (1.000-1.200 kata): evaluasi dinamika relasi negara-masyarakat sipil pada satu kasus pemilihan lokal di Kawasan Timur Indonesia menggunakan minimal dua perspektif teoritik, disertai daftar pustaka minimal 3 sumber dari daftar wajib; dikumpulkan di SPOT UNISAN sebelum UAS	umpan balik terstruktur kepada presentasi sejawat menggunakan lembar peer-review yang disediakan; mahasiswa merevisi draf berdasarkan umpan balik sebelum pengumpulan final MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan peer-review terstruktur: mahasiswa saling mengevaluasi ketepatan argumen, konsistensi penggunaan perspektif teoritik, dan keabsahan sumber empiris yang digunakan; nilai Harmony diwujudkan melalui kemampuan membangun sintesis antara teori dan realitas lokal Kawasan Timur Indonesia; nilai Service tercermin dalam orientasi analisis terhadap kepentingan masyarakat dalam evaluasi pemilihan lokal	memanfaatkan AI generatif (sesuai pedoman etis UNISAN) untuk mengeksplorasi kerangka argumen, namun seluruh analisis dan kutipan merupakan karya orisinal mahasiswa MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mengembangkan esai evaluatif sebagai proyek tulisan ilmiah individual yang dimulai dari draf awal (disiapkan sebelum sesi luring) dan disempurnakan setelah mendapat umpan balik sejawat Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Heywood, A. (2013); Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2016); Budiardjo, M. (2008); Syafiie, I. K. (2011); Rodee, C. C., Anderson, T. J., Christol, C. Q., & Greene, T. H. (1983); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sebagai bagian penilaian Sub-CPMK7 berbobot 14%	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menyusun esai evaluatif individual yang mengevaluasi dinamika relasi antara negara dan masyarakat sipil pada konteks kepemiluan lokal (Pilkada atau Pemilu legislatif) di salah satu kabupaten/kota Kawasan Timur Indonesia. Esai wajib menggunakan minimal dua perspektif teoritik yang berbeda (dipilih dari perspektif pluralis, neo-Gramscian, atau perspektif lain yang dikaji), menyertakan data empiris dari sumber resmi yang dapat diverifikasi, dan menghasilkan penilaian evaluatif tentang kualitas tata kelola pemerintahan demokratis pada kasus tersebut. Pengutipan sumber wajib dilakukan secara jujur dan akuntabel sesuai kaidah akademik (Integrity). Draf			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				awal dipresentasikan pada sesi luring untuk mendapat umpan balik, dan versi final dikumpulkan setelah revisi. Deliverable: Satu file esai evaluatif dalam format PDF (1.000-1.200 kata, tidak termasuk daftar pustaka) berisi: (1) latar belakang kasus pemilihan lokal yang dipilih beserta sumber data resmi, (2) analisis evaluatif menggunakan dua perspektif teoritik secara eksplisit dan konsisten, (3) penilaian komparatif kekuatan dan kelemahan masing-masing perspektif dalam menjelaskan kasus, (4) simpulan evaluatif tentang implikasi bagi tata kelola pemerintahan demokratis di daerah tersebut, dan (5) daftar pustaka minimal 3 sumber dari daftar wajib RPS; dikumpulkan melalui SPOT UNISAN			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Sub-CPMK8: Merancang dan mempresentasikan sintesis kritis atas perkembangan ilmu pemerintahan—dari pendekatan klasik menuju kontemporer—serta implikasinya bagi praktik pemerintahan adaptif dan berintegritas di Indonesia, sebagai capstone menjelang UAS.	Mahasiswa mampu: - Merancang kerangka sintesis kritis yang memetakan perkembangan ilmu pemerintahan dari pendekatan klasik (normatif-institusional) menuju pendekatan kontemporer (empiris-kritis-demokratis) secara koheren dan berbasis pustaka - Mengintegrasikan konsep-konsep kunci yang telah dipelajari sepanjang semester—meliputi legitimasi, desentralisasi, relasi negara-masyarakat sipil, dan tata kelola demokratis—ke dalam satu narasi argumentatif yang utuh - Mengevaluasi implikasi perkembangan ilmu	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes sumatif tertulis; penilaian dilakukan melalui presentasi capstone dan makalah sintesis; penilaian presentasi mencakup: ketepatan pemetaan perkembangan ilmu pemerintahan, kedalaman integrasi konsep lintas topik semester, relevansi implikasi bagi praktik pemerintahan adaptif di Indonesia, dan kualitas argumentasi lisan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan refleksi singkat perjalanan pembelajaran semester dan menjelaskan skema presentasi capstone; dosen memfasilitasi sesi presentasi bergilir (10-12 menit presentasi + 5 menit tanya jawab) di mana setiap mahasiswa atau kelompok kecil memaparkan sintesis kritisnya; dosen memberikan umpan balik substantif yang menghubungkan presentasi mahasiswa dengan kerangka besar ilmu pemerintahan dan implikasinya bagi tata kelola nasional termasuk Kawasan Timur Indonesia; dosen menutup sesi dengan konsolidasi menyeluruh dan arahan persiapan UAS (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan Makalah Sintesis Capstone dan rubrik penilaian presentasi di SPOT UNISAN; dosen menyediakan video rekam semester (15-20 menit) yang menelusuri benang merah seluruh topik dari Minggu 1 (definisi dan objek kajian) hingga Minggu 14 (relasi negara-masyarakat sipil) sebagai scaffolding sintesis; dosen membuka forum konsultasi daring untuk mahasiswa yang memerlukan arahan dalam mengintegrasikan konsep lintas topik (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses video rekam semester dan meninjau kembali	Bahan Kajian: - Sintesis perkembangan ilmu pemerintahan: dari pendekatan normatif-institusional klasik menuju pendekatan empiris-kritis-demokratis kontemporer; - Integrasi konsep lintas topik semester: legitimasi kekuasaan, desentralisasi, otonomi daerah, relasi negara-masyarakat sipil, dan tata kelola demokratis; - Implikasi perkembangan ilmu pemerintahan bagi praktik pemerintahan adaptif dan berintegritas di Indonesia; - Tata kelola pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia sebagai konteks evaluasi sintesis	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintahan bagi praktik pemerintahan yang adaptif dan berintegritas di Indonesia, dengan merujuk pada konteks Kawasan Timur Indonesia • Mempresentasikan sintesis kritis secara lisan dan tertulis dengan menggunakan argumen yang terstruktur, logis, dan didukung bukti dari sumber yang dikutip secara bertanggung jawab • Menunjukkan kemampuan adaptasi perspektif teoritik yang beragam sesuai konteks kasus pemerintahan yang dihadapi sebagai cerminan kematangan analitis menjelang UAS	(rubrik presentasi 4 kriteria x 4 skala) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan memberikan umpan balik konstruktif dan pertanyaan substantif saat sesi presentasi capstone sejawat; kemampuan menghubungkan presentasi sejawat dengan konsep yang dipelajari di minggu-minggu sebelumnya; sikap menghargai keberagaman perspektif dan konteks lokal yang berbeda (Harmony dan Adaptability); dinilai dengan rubrik partisipasi	Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan Makalah Sintesis Capstone menggunakan media visual (slide atau peta konsep cetak); mahasiswa memberikan umpan balik tertulis singkat kepada minimal dua presentasi sejawat menggunakan lembar peer-review; mahasiswa mencatat umpan balik dosen dan sejawat untuk penyempurnaan makalah final sebelum UAS MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan sesi presentasi capstone: mahasiswa menampilkan produk akhir sintesis kritis semester sebagai bukti integrasi capaian pembelajaran; nilai Nationalism diwujudkan melalui keberpihakan argumen	seluruh bahan kajian melalui SPOT UNISAN; mahasiswa menyusun draf peta konsep sintesis yang menghubungkan minimal lima topik utama semester; mahasiswa dapat memanfaatkan AI generatif (sesuai Pedoman Penggunaan AI Generatif Etis UNISAN) untuk memetakan hubungan antarkonsep, namun narasi argumentatif dan penilaian implikasi wajib merupakan karya orisinal mahasiswa MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mengembangkan proyek sintesis capstone sebagai produk akhir yang mengintegrasikan seluruh capaian pembelajaran semester, dimulai dari peta konsep	kritis; • Kerangka capstone: refleksi kritis atas capaian pembelajaran semester dan proyeksi pengembangan ilmu pemerintahan; Pustaka: Syafiie, I. K. (2011); Budiardjo, M. (2008); Heywood, A. (2013); Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2016); Rodee, C. C., Anderson, T. J., Christol, C. Q., & Greene, T. H. (1983); Kaho, Josef Riwu. (2012); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4 skala Tugas: Makalah Sintesis Capstone individual (1.200-1.500 kata) yang merancang peta konsep perkembangan ilmu pemerintahan dan mempresentasikan nnya dalam sesi pleno (10-12 menit per mahasiswa atau kelompok kecil), disertai daftar pustaka minimal 4 sumber dari daftar wajib RPS; dikumpulkan di SPOT UNISAN sebelum UAS sebagai bagian penilaian Sub-CPMK8 berbobot 7%	pada penguatan tata kelola pemerintahan yang berdaulat dan berkeadilan bagi seluruh wilayah Indonesia; nilai Creativity tercermin dalam pengembangan perspektif orisinal mahasiswa dalam menelaah implikasi perkembangan ilmu pemerintahan bagi konteks lokal; nilai Integrity dijaga melalui kewajiban mengutip sumber secara jujur dan transparan dalam seluruh komponen presentasi dan makalah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa merancang dan mempresentasikan Makalah Sintesis Capstone yang membangun narasi argumentatif tentang perkembangan ilmu pemerintahan dari pendekatan klasik menuju kontemporer. Makalah wajib mengintegrasikan	daring yang kemudian dikembangkan menjadi makalah dan presentasi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				minimal lima konsep kunci yang dipelajari sepanjang semester (misalnya: definisi dan objek kajian, paradigma pemerintahan, teori legitimasi, desentralisasi dan otonomi daerah, serta relasi negara-masyarakat sipil) dan mengevaluasi implikasinya bagi praktik pemerintahan yang adaptif dan berintegritas di Indonesia, dengan memberikan perhatian khusus pada konteks Kawasan Timur Indonesia. Presentasi dilakukan secara lisan dalam sesi pleno sebagai capstone menjelang UAS. Seluruh argumen wajib didukung kutipan sumber yang dapat diverifikasi (Integrity), dan analisis implikasi wajib mencerminkan kepekaan terhadap keberagaman konteks lokal (Harmony, Nationalism). Deliverable: Satu file Makalah Sintesis Capstone			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dalam format PDF (1.200-1.500 kata, tidak termasuk daftar pustaka) berisi: (1) peta konsep perkembangan ilmu pemerintahan dari klasik ke kontemporer (dapat disajikan sebagai diagram atau tabel di dalam makalah), (2) narasi argumentatif yang mengintegrasikan minimal lima konsep kunci semester secara koheren, (3) evaluasi implikasi perkembangan tersebut bagi praktik pemerintahan adaptif dan berintegritas di Indonesia dengan contoh konkret dari Kawasan Timur Indonesia, (4) refleksi kritis tentang keterbatasan pendekatan yang digunakan, dan (5) daftar pustaka minimal 4 sumber dari daftar wajib RPS; makalah dikumpulkan melalui SPOT UNISAN dan dipresentasikan secara lisan pada sesi luring Minggu 15			
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester : Cakupan: Sub-CPMK5–Sub-CPMK8						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB=** Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT=**Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM=**Kegiatan Mandiri, **P=**Praktikum.

3. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
1	Tugas Analisis Kasus	20	
2	Kuis	15	
3	UTS	25	
4	Makalah Komparatif	15	
5	UAS	25	
	Total Bobot (%)	100	

Rekonsiliasi Bobot Komponen Penilaian dengan Bobot Sub-CPMK

Bobot komponen penilaian pada tabel di atas dan bobot Sub-CPMK merupakan dua cara pandang atas nilai akhir yang sama: penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK, penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian.

Sub-CPMK	Tugas Analisis Kasus	Kuis	UTS	Makalah Komparatif	UAS	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	—	8	—	—	—	8
Sub-CPMK2	—	7	—	—	—	7
Sub-CPMK3	—	—	—	15	—	15
Sub-CPMK4	—	—	13	—	—	13
Sub-CPMK5	—	—	12	—	—	12
Sub-CPMK6	20	—	—	—	—	20
Sub-CPMK7	—	—	—	—	13	13
Sub-CPMK8	—	—	—	—	12	12
Bobot Komponen (%)	20	15	25	15	25	100

Nilai Akhir Program Sarjana — Kurikulum 2023

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
85.00 – 100.00	A	4.00
75.00 – 84.99	B	3.00
65.00 – 74.99	C	2.00
50.00 – 64.99	D	1.00
0.00 – 49.99	E	0.00

4. Rencana Tugas

Rencana Tugas: Final Project: Menyusun Sintesis Kritis Ilmu Pemerintahan dan Merancang Rekomendasi Kebijakan berbasis Studi Kasus Gejala Pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				
RENCANA TUGAS MAHASISWA						
MATA KULIAH	Pengantar Ilmu Pemerintahan					
KODE	3KKFS100	sks	3	SEMESTER	1	
DOSEN PENGAMPU	Marten Nusi, S.I.P., M.A.P					
METODE PENUGASAN						
Project-Based Learning (PjBL) berbasis Case-Based Learning (CBL)						
JUDUL TUGAS						
Final Project: Menyusun Sintesis Kritis Ilmu Pemerintahan dan Merancang Rekomendasi Kebijakan berbasis Studi Kasus Gejala Pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia						
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH						
Sub-CPMK2: Mengklasifikasikan paradigma-paradigma utama ilmu pemerintahan (normatif, empiris, dan kritis) serta menilai relevansi masing-masing paradigma dalam konteks gejala pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia.						
Sub-CPMK3: Menganalisis relasi ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu dengan mengidentifikasi titik temu, perbedaan, dan kontribusi lintas disiplin tersebut melalui studi literatur komparatif.						
Sub-CPMK4: Menyusun kerangka epistemologis ilmu pemerintahan secara terpadu—mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi—sebagai landasan untuk menganalisis satu gejala pemerintahan aktual, sebagai persiapan UTS.						
Sub-CPMK6: Menganalisis fungsi-fungsi pemerintahan (pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan) melalui studi kasus nyata pada unit pemerintahan daerah di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia menggunakan pendekatan Case-Based Learning.						
Sub-CPMK7: Mengevaluasi dinamika relasi antara negara dan masyarakat sipil dalam konteks tata kelola pemerintahan demokratis dengan menggunakan minimal 2 perspektif teoritik yang berbeda.						
Sub-CPMK8: Merancang dan mempresentasikan sintesis kritis atas perkembangan ilmu pemerintahan—dari pendekatan klasik menuju kontemporer—serta implikasinya bagi praktik pemerintahan adaptif dan berintegritas di Indonesia, sebagai capstone menjelang UAS.						
DISKRIPSI TUGAS						
Mahasiswa secara berkelompok memilih satu gejala pemerintahan aktual—seperti ketimpangan pelayanan publik, krisis legitimasi kepala daerah, atau dinamika relasi negara-masyarakat adat—yang terjadi pada unit pemerintahan daerah di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan gejala tersebut, mahasiswa mengonstruksi kerangka epistemologis ilmu pemerintahan (ontologi–epistemologi–aksiologi), menganalisis gejala dari minimal dua paradigma (normatif, empiris, atau kritis) dan dua perspektif lintas disiplin, mengevaluasi fungsi pemerintahan serta relasi negara–masyarakat sipil yang terlibat, lalu merancang sintesis kritis dan rekomendasi kebijakan adaptif yang dipresentasikan di hadapan dosen dan pembahas sebaya. Proyek ini merupakan capstone yang mengintegrasikan seluruh capaian pembelajaran semester, menuntut integritas akademik dalam penggunaan sumber, kreativitas dalam menyajikan argumen, dan kepekaan terhadap konteks lokal Kawasan Timur Indonesia sebagai wujud nilai ICHSA-N.						
CAKUPAN UTAMA KERTAS KERJA (Contoh berdasarkan berbagai kasus)						
Identifikasi dan justifikasi gejala pemerintahan aktual di Sulawesi/Kawasan Timur Indonesia berdasarkan bukti empiris (berita, dokumen kebijakan, atau data sekunder)						

Konstruksi kerangka epistemologis terpadu (ontologi, epistemologi, aksiologi) ilmu pemerintahan yang relevan dengan kasus yang dipilih Analisis komparatif paradigma ilmu pemerintahan: minimal dua dari tiga paradigma (normatif, empiris, kritis) diterapkan secara eksplisit pada kasus Pemetaan relasi lintas disiplin (ilmu politik, sosiologi, dan/atau filsafat ilmu) melalui studi literatur komparatif yang mengidentifikasi titik temu dan kontribusi masing-masing disiplin Analisis fungsi pemerintahan (pelayanan, pemberdayaan, pembangunan) dan evaluasi legitimasi kekuasaan dari perspektif klasik dan kontemporer pada kasus terpilih Evaluasi dinamika relasi negara–masyarakat sipil menggunakan minimal dua perspektif teoritik yang berbeda Sintesis kritis perkembangan ilmu pemerintahan (klasik ke kontemporer) dan implikasinya bagi praktik pemerintahan adaptif dan berintegritas Rekomendasi kebijakan yang terukur, kontekstual, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kawasan Timur Indonesia (nilai Service dan Nationalism) Presentasi dan pitching akademik disertai sesi tanya-jawab kritis dengan pembahas sebaya dan dosen
LANGKAH Pengerjaan Tugas Minggu 3–4 Pembentukan kelompok (3–4 mahasiswa) dan seleksi topik: Setiap kelompok mengajukan proposal singkat (1 halaman) berisi identifikasi gejala pemerintahan aktual di Sulawesi/KTI, justifikasi relevansi akademik, dan rencana sumber data sekunder; dosen memberikan persetujuan tertulis sebelum Minggu 5. Minggu 5–6 Studi literatur dan konstruksi kerangka epistemologis: Kelompok melakukan review literatur dari daftar rujukan RPS, memetakan posisi ontologis, epistemologis, dan aksiologis studi mereka, serta mengidentifikasi paradigma ilmu pemerintahan yang akan digunakan sebagai lensa analisis. Minggu 7–8 Analisis lintas disiplin dan pemetaan paradigma: Kelompok menyusun matriks komparatif yang memetakan titik temu dan perbedaan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu dalam konteks kasus; setiap anggota bertanggung jawab atas satu disiplin secara individual. Minggu 9–10 Analisis fungsi pemerintahan dan legitimasi kekuasaan: Kelompok menganalisis secara mendalam fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan/atau pembangunan yang terganggu atau berjalan pada kasus, serta menelaah basis legitimasi kekuasaan aktor pemerintahan yang terlibat dari perspektif klasik (Weber, Rousseau) dan kontemporer. Minggu 11–12 Evaluasi relasi negara–masyarakat sipil: Kelompok mengevaluasi pola interaksi antara negara dan masyarakat sipil pada kasus menggunakan minimal dua perspektif teoritik (mis. civil society Habermas vs. neo-Tocquevillian, atau perspektif indigenous governance); output berupa draf bagian evaluasi dalam laporan. Minggu 13 Penyusunan sintesis kritis dan rekomendasi kebijakan: Kelompok mengintegrasikan seluruh analisis menjadi sintesis naratif yang menunjukkan perkembangan ilmu pemerintahan dari pendekatan klasik ke kontemporer, lalu merumuskan minimal tiga rekomendasi kebijakan yang spesifik, terukur, dan kontekstual untuk pemerintah daerah terkait. Minggu 14 Finalisasi laporan dan penyusunan slide presentasi: Laporan akhir (4.000–6.000 kata, tidak termasuk daftar pustaka dan lampiran) dikumpulkan melalui LMS paling lambat H-3 sebelum jadwal presentasi; slide presentasi (15–20 slide) diunggah bersamaan. Minggu 15 Presentasi dan pitching akademik: Setiap kelompok mempresentasikan proyek selama 15 menit dan menjawab pertanyaan kritis dari dosen dan dua kelompok pembahas sebaya selama 10 menit; sesi ini menguji kedalaman pemahaman dan kemampuan mempertahankan argumen secara akademik. Minggu 16 Revisi dan pengumpulan laporan final: Kelompok menyerahkan laporan yang telah direvisi berdasarkan catatan dari sesi presentasi; disertai lembar refleksi individu (300–500 kata) yang menghubungkan pengalaman proyek dengan nilai integritas dan adaptabilitas dalam praktik pemerintahan.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN a. Proposal topik (1 halaman, Minggu 4); 2) Laporan Akhir tertulis (4.000–6.000 kata): mencakup kerangka epistemologis, analisis paradigma komparatif, pemetaan lintas disiplin, analisis fungsi pemerintahan dan legitimasi, evaluasi relasi negara–masyarakat sipil, sintesis kritis, dan rekomendasi kebijakan; 3) Slide presentasi (15–20 slide, format PDF/PPT); 4) Rekaman atau dokumentasi sesi presentasi; 5) Lembar refleksi individu (300–500 kata per anggota) tentang implikasi proyek bagi pemahaman pemerintahan adaptif dan berintegritas.
INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN a. Kerangka Epistemologis dan Identifikasi Gejala (bobot 20%). Dinilai berdasarkan ketepatan konstruksi kerangka ontologi–epistemologi–aksiologi yang terpadu dan relevan dengan gejala pemerintahan aktual di KTI yang dipilih, didukung bukti empiris yang sah dari sumber sekunder. b. Analisis Paradigma dan Lintas Disiplin (bobot 25%). Dinilai berdasarkan kedalaman penerapan minimal dua paradigma ilmu pemerintahan dan ketajaman pemetaan komparatif lintas disiplin (ilmu politik, sosiologi, filsafat ilmu) yang mengidentifikasi titik temu, perbedaan, dan kontribusi masing-masing secara eksplisit.

c. Analisis Fungsi Pemerintahan, Legitimasi, dan Relasi Negara–Masyarakat Sipil (bobot 25%). Dinilai berdasarkan keajegan analisis fungsi pemerintahan (pelayanan/pemberdayaan/pembangunan), ketepatan penggunaan teori legitimasi klasik dan kontemporer, serta kualitas evaluasi dinamika negara–masyarakat sipil menggunakan minimal dua perspektif teoritik yang berbeda.

d. Sintesis Kritis dan Rekomendasi Kebijakan (bobot 15%). Dinilai berdasarkan kemampuan mengintegrasikan seluruh analisis menjadi narasi sintesis yang koheren tentang perkembangan ilmu pemerintahan klasik ke kontemporer, serta kualitas rekomendasi kebijakan yang spesifik, terukur, dan kontekstual bagi pemerintahan daerah di KTI.

e. Presentasi, Argumentasi, dan Kemampuan Mempertahankan Posisi (bobot 15%). Dinilai berdasarkan kejelasan penyampaian, sistematika slide, kualitas argumentasi akademik dalam menjawab pertanyaan dosen dan pembahas sebaya, serta kemampuan menampilkan posisi kritis secara percaya diri dan berintegritas.

JADWAL PELAKSANAAN	
Minggu 3–4: Pembentukan kelompok, seleksi topik, dan pengumpulan proposal (deliverable: proposal 1 halaman) Minggu 5–6: Studi literatur dan konstruksi kerangka epistemologis Minggu 7–8: Penyusunan analisis paradigma komparatif dan pemetaan lintas disiplin (deliverable: matriks komparatif) Minggu 9–10: Analisis fungsi pemerintahan dan teori legitimasi kekuasaan Minggu 11–12: Evaluasi relasi negara–masyarakat sipil (deliverable: draf bagian evaluasi) Minggu 13: Penyusunan sintesis kritis dan rekomendasi kebijakan Minggu 14: Finalisasi laporan akhir dan slide; pengumpulan ke LMS (H-3 sebelum presentasi) Minggu 15: Presentasi dan pitching akademik + sesi pembahas sebaya Minggu 16: Revisi laporan dan pengumpulan laporan final + lembar refleksi individu	
LAIN-LAIN	
Final project dikerjakan secara berkelompok (3–4 mahasiswa per kelompok) dengan pembagian tanggung jawab analisis yang didokumentasikan dalam lembar kontribusi anggota (dilampirkan pada laporan akhir); setiap anggota wajib menyerahkan lembar refleksi individu sebagai bukti kontribusi personal yang dinilai secara terpisah dalam komponen presentasi. Keterlambatan pengumpulan laporan akhir dikenai pengurangan nilai 5 poin per hari kalender; proposal yang tidak mendapat persetujuan dosen pada Minggu 4 tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Topik kasus wajib berkaitan dengan gejala pemerintahan di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia guna memastikan relevansi konteks lokal UNISAN dan menumbuhkan nilai Nationalism serta Service kepada masyarakat sekitar. Plagiarisme yang terdeteksi melalui perangkat pendeteksi kemiripan (similarity >25%) akan mengakibatkan diskualifikasi tugas dan proses sanksi akademik sesuai peraturan UNISAN, sebagai penegakan nilai Integrity dalam komunitas akademik.	
DAFTAR RUJUKAN	
Sumber rujukan mengacu pada daftar pustaka RPS Pengantar Ilmu Pemerintahan yang telah ditetapkan. Mahasiswa wajib menggunakan minimal 6 referensi dari daftar pustaka RPS dan mencantumkan seluruh sumber dalam format APA Edisi ke-7. Referensi tambahan di luar RPS diperbolehkan maksimal 3 judul, dengan persetujuan dosen, dan tidak menggantikan rujukan wajib dari RPS.	

5. Rubrik Penilaian — Rubrik Analitik (belum ada rubrik tersimpan)

Nama Mahasiswa		NIM	
Judul Tugas			
No	Kriteria	Skor Penilaian	
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)
		Cukup (60-69)	Kurang (<60)

6. Norma Akademik

1. Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat itu dianggap tidak hadir pada sesi tsb kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat yang ditetapkan; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh -- plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
5. Pemanfaatan Generative AI (GenAI) wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan; dilarang dipakai saat UTS/UAS/kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber/subjek penelitian dijaga sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
8. Komunikasi dosen-mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi), bukan kanal pribadi.